4-30-2008

Hukum yang Dipergunakan dalam Kontrak Dagang Internasional

Sri Laksmi Anindita

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil>

Part of the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Anindita, Sri Laksmi (2008) "Hukum yang Dipergunakan dalam Kontrak Dagang Internasional," *Indonesian Journal of International Law*: Vol. 5 : No. 3 , Article 8.

DOI: 10.17304/ijil.vol5.3.181

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijil/vol5/iss3/8>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Journal of International Law by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Hukum yang Dipergunakan dalam Kontrak Dagang Internasional

Sri Laksmi Aniadita¹

International business contract basically is an agreement between two or more parties which has certain commercial value, where there is a foreign element. Nevertheless, the party in the international business contract has to be a legal entity which has the capability to act before the law. Furthermore, drafting an international business contract should not breach the regulation that govern the parties and formal regulation as where the contract is signed and prevailed. In an international business contract, it is common to mention the dispute settlement mechanism and the choice of law which will be used if a dispute arises. The common mechanism that is used is arbitration. However, the principle of Pacta Sunt Servanda, should not put aside the prevailing laws. Even though the contract stated that the parties has chosen arbitration as the mechanism for the dispute settlement, however if a party wish to file a bankruptcy petition, it should be filed to the bankruptcy court and use the Bankruptcy Act.

Kontrak dagang/kontrak bisnis secara sederhana adalah suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak yang mempunyai nilai komersial tertentu, dimana ada unsur asing di dalamnya. Pihak dalam kontrak dagang internasional tersebut haruslah subyek hukum yang punya kemampuan bertindak di hadapan hukum. Dalam penyusunan suatu kontak dagang internasional tidak boleh bertentangan dengan hukum materil para pihak dan hukum formil dimana perjanjian tersebut ditandatangani dan berlaku.

Dalam suatu kontrak dagang internasional lazimnya disebutkan cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari lengkap dengan pilihan hukum yang kelak akan dipergunakan. Cara

¹ Penulis adalah staf pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) semenjak 2006. Selain aktif mengajar, Penulis yang mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum dari FHUI, saat ini sedang ditugaskan pada Kantor Pelayanan Peraturan dan Hukum (KPPH) Universitas Indonesia.

penyelesaian sengketa yang biasa dipilih oleh para pihak adalah melalui arbitrase. *Asas Pacta Sunt Servanda*, tidak mengenyampingkan berlakunya Undang-undang. Walaupun dalam perjanjian disebutkan pilihan penyelesaian sengketa adalah melalui badan arbitrase, tetapi apabila salah satu pihak hendak mengajukan pailit tetap yang digunakan adalah Undang-undang Kepailitan, yaitu melalui Pengadilan Niaga.

Hukum

Manusia menurut Aristoteles adalah *zoon politicon* yaitu mahluk yang bergaul². Masing-masing anggota masyarakat berkepentingan. Perbedaan kepentingan dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, sehingga diperlukan tata tertib yang dapat menyeimbangkan usaha-usaha yang dilakukan masing-masing pihak agar terpenuhi kepentingan mereka yang bertentangan, secara damai.

Hukum adalah gejala sosial dan tiada masyarakat tanpa hukum. Menurut Van Apeldoorn "Hukum³ terdapat di seluruh dunia, dimana ada suatu masyarakat manusia", pendapat Apeldoorn tersebut didukung oleh hasil penyelidikan ilmu sosial yang disebut antropologi budaya. Tidak ada seorang ahli hukum yang dapat memberikan definisi hukum⁴ secara tepat.

Unsur-unsur yang terkandung dalam definisi hukum adalah sebagai berikut:

²E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet. ke-11, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1989), hal 2.

³Definisi hukum menurut R. Soeroso, SH., secara umum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

⁴Abdulkadir Muhammad, SH., hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.

Drs. C.S.T. Kansil, SH., hukum itu mengadakan ketata-tertiban dalam pergaulan manusia, sebagai keamanan dan ketertiban terpelihara.

1. Peraturan dibuat oleh yang berwenang,
2. Tujuannya mengatur tata tertib kehidupan masyarakat,
3. Mempunyai ciri memerintah dan melarang,
4. Bersifat memaksa dan ditaati.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan dan dimana terdapat masyarakat (*ubi societas ibi us*). Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila ada yang mengatakan, bahwa hukum tidak dapat lagi disebut hukum, manakala ia tidak pernah dilaksanakan (lagi)⁵.

Sebagai kaidah (norma) hukum dapat dirumuskan sebagai berikut: hukum adalah himpunan petunjuk hidup yaitu perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh Pemerintah atau penguasa masyarakat itu⁶.

Hukum merupakan himpunan bermacam-macam kaidah yang bertujuan mempertahankan tatatertib masyarakat. Tetapi kaidah yang bertujuan mempertahankan tata tertib masyarakat terdapat pula dalam agama, kebiasaan, adat-istiadat dan kesusilaan⁷ dalam pergaulan manusia sehari-hari⁸.

Hukum Internasional

Pengertian Internasional, berarti adanya unsur asing, bisa berupa para pihak, badan arbitrase, tempat arbitrase diselenggarakan,

⁵Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1993), hal 5.

⁶Utrecht, *op.cit.*, hal.3.

⁷Kesusilaan yang dimaksud adalah semua kaidah yang ada dalam pergaulan kemasyarakatan dan yang tidak merupakan hukum, kebiasaan atau adat istiadat dan agama.

⁸E.Utrecht, *op.cit.*, hal 4 .

tempat putusan arbitrase ditetapkan⁹. Pengertian hukum Internasional adalah:

“keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:

1. negara dengan negara;
2. negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain¹⁰”.

Hukum internasional tidak mungkin dapat berjalan bila masing-masing negara masih memegang teori kedaulatan negara secara penuh. Teori kedaulatan negara berarti negara tidak mengakui ada kekuasaan yang lebih tinggi dari negara tersebut termasuk hukum internasional.

Bila kita perhatikan konsep kedaulatan negara hubungannya dengan suatu masyarakat internasional yang diatur oleh hukum internasional maka tidak ada pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional karena adanya paham kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat negara¹¹.

Tiga periode perkembangan Hukum Internasional:

1. Perkembangan bangsa-bangsa kecil dengan konsepsi kedaulatan negara yang harus mengadakan hubungan dengan negara/ bangsa lain¹².
2. Perkembangan Hukum internasional yang berada dibawah hukum nasional. Perjanjian internasional yang disetujui tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku di negara tersebut (harus diratifikasi dulu)¹³.

⁹Tineke Louise Tuegeh Lengdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal 27.

¹⁰Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional Buku I – Bagian Umum*, cet.6. (Bandung: Binacipta, 1989), hal. 3

¹¹*Ibid*, hal 13.

¹²J.L.Brierly, *Hukum Bangsa-Bangsa suatu pengantar hukum internasional*, (Jakarta: PT. Bhratara, 1996), hal 37.

¹³Mochtar Kusumaatmadja, *op.cit.*, hal.60-61.

3. Perkembangan hukum internasional mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari hukum nasional (Supra nasional). Hal ini terjadi karena semakin banyaknya perjanjian dan peraturan internasional dan pemberlakuannya semakin memaksa dan dipaksakan, contoh Hak Asasi Manusia, teroris, dan lain-lain¹⁴.

Subyek Hukum Internasional

Seperti telah disebutkan di atas bahwa negara merupakan subyek hukum internasional, akan tetapi negara bukanlah satu-satunya subyek hukum internasional¹⁵. Dalam arti yang sebenarnya subyek hukum internasional adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional¹⁶.

Berdasarkan pengertian subyek hukum internasional di atas maka kita mengenal subyek hukum internasional adalah:

1. Negara;
2. Takhta Suci;
3. Palang Merah Internasional;
4. Organisasi Internasional;
5. Orang Perorangan (Individu);
6. Pemberontak dan pihak dalam sengeta (*belligerent*)¹⁷.

Sumber Hukum Internasional

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional, dikatakan bahwa dalam mengadili perkara yang diajukan kepadanya, Mahkamah Internasional akan mempergunakan:

1. Perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa;

¹⁴*Ibid.*, hal 62.

¹⁵*Ibid.*, hal.68.

¹⁶*Ibid.*, hal.70.

¹⁷*Ibid.*, hal. 70-79

2. Kebiasaan internasional, sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum;
3. Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab;
4. Keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaidah hukum¹⁸.

Kontrak Dagang Internasional

Kontrak dagang atau bisa juga disebut sebagai kontrak bisnis dapat digambarkan secara sederhana sebagai suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak yang mempunyai nilai komersial tertentu¹⁹. Pihak dalam kontrak dagang ini tentunya adalah subyek hukum yang punya kemampuan bertindak di hadapan hukum.

Dalam penyusunan suatu kontak dagang tentunya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku salah satunya adalah tentang syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato²⁰. Prof Gautama menuliskan *four elements are required to establish a contract*²¹.

¹⁸ *ibid.*, hal 82.

¹⁹ Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal 39.

²⁰ Pasal 1320 KUHPerdato menyatakan: untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Dikutip dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* diterjemahkan oleh Prof R Subekti, S.H. dan R. Tjirosudibio (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992), hal, 283.

²¹ *To Establish a contract, four elements are required.*

(1) *the consent of the parties;*

Dalam suatu kontrak dagang internasional lazimnya disebutkan cara penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari lengkap dengan pilihan hukum yang kelak akan dipergunakan, walaupun ada juga kontrak yang tidak mengatur secara tegas kedua hal tersebut. Sengketa yang timbul dari suatu perjanjian dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau diluar jalur pengadilan.

Penyelesaian sengketa

Dalam kontrak dagang yang penting antara pengusaha Indonesia dengan pedagang luar negeri sering dicantumkan klausula arbitrase²² yaitu arbitrase luar negeri²³. Hal ini dapat dimengerti karena pengusaha asing pada umumnya khawatir untuk menyelesaikan sengketanya dengan pengusaha Indonesia di hadapan pengadilan nasional²⁴.

Dalam KUHPerdata Pasal 1338 memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat perjanjian yaitu, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"²⁵. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap pihak diberi kebebasan untuk membuat perjanjian yang kelak akan

(2) *a capacity to contract*

(3) *a subject certain;*

(4) *a lawful purpose.*

Dikutip dari Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002) hal. 75

²² Arbitrase ialah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Indonesia, Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, No.30 tahun 1999, LN. No. 138, TLN No. 3872. Pasal 1 point 1.

²³ Arbitrase Luar Negeri, adalah arbitrase yang mengandung unsur asing; bisa berupa para pihak, badan arbitrase, ketentuan arbitrase, tempat arbitrase dilaksanakan atau tempat putusan arbitrase ditetapkan.

²⁴ Tineke, *op.cit.*, hal. 35.

²⁵ R.Subekti, *op.cit.*, hal 285.

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka dengan syarat perjanjian tersebut harus sudah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.

Konvensi New York 1958, juga mengakui kehendak dari para pihak dalam arti kebebasan para pihak (*partijautonomie*) untuk memilih sendiri yurisdiksi atau forum arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa yang mungkin akan²⁶ atau telah timbul²⁷ antara para pihak²⁸. Kesepakatan yang berisi bahwa para pihak telah setuju untuk memilih yurisdiksi arbitrase dengan mengenyampingkan forum peradilan umum harus dalam bentuk tertulis, untuk mengingatkan dan menyadarkan para pihak tentang pilihan forum yang telah mereka sepakati²⁹.

Perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis tidak dapat ditarik oleh salah satu pihak, karena kewajiban untuk berarbitrase ini sifatnya terpisah dengan kontrak³⁰.

Pasal 3 Undang-undang Arbitrase, berbunyi, "Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."

Pasal 11 Undang-undang Arbitrase, berbunyi:

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri.
- (2) Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalam suatu sengketa yang telah ditetapkan melalui

²⁶ *Pactum de compromittendo*, perjanjian yang isinya syarat atau klausul arbitrase untuk penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

²⁷ *Acta compromis*, perjanjian untuk penyelesaian sengketa yang telah timbul dengan arbitrase.

²⁸ Tineke, *op.cit.*, hal. 20.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994), hal, 31

arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini³¹.

Alasan-alasan para pihak memilih arbitrase, adalah:

1. Penyelesaian sengketa lebih cepat, ringan biaya tanpa publisitas (tertutup)³²,
2. Arbiter yang kompeten yang memiliki pengetahuan yang khusus,
3. Menghindarkan berlakunya sistem hukum asing,
4. Pelaksanaan putusan arbitrase secara sukarela,
5. Putusan yang adil dan perubahan, penyesuaian, atau perlengkapan isi kontrak.³³

Tidak semua sengketa arbitrase dapat diserahkan dan diselesaikan oleh badan arbitrase komersial internasional, yang dapat diselesaikan hanyalah sengketa menyangkut masalah-masalah komersial, yang dibatasi oleh *Public Policy*^{34 35}.

Pasal 25 Konvensi Washington melahirkan beberapa persyaratan arbitrase yaitu:

- a. Persyaratan subyektif mengenai para pihak;
- b. Persyaratan obyektif mengenai adanya hubungan langsung dengan suatu penanaman modal;
- c. Adanya kesepakatan para pihak³⁶.

Seperti telah dituliskan diatas bahwa tidak semua sengketa arbitrase dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase komersil

³¹Indonesia, *loc.cit.*

³²*Ibid.*, Pasal 27

³³Tineke, *op.cit.*, hal 43-44.

³⁴Huala Adolf, *op.cit* hal.25

³⁵Pengertian *Public policy* (ketertiban umum), dipergunakan sebagai alasan untuk menolak berlakunya putusan arbitrase luar negeri, sedangkan seharusnya menurut ketentuan yang berlaku putusan arbitrase tersebut seharusnya dapat dilaksanakan. Tineke, *op.cit.*, hal. 27

³⁶Huala Adolf, *op.cit* hal 28.

internasional, putusan arbitrase yang mengandung pokok perkara yang tidak bisa diselesaikan dengan arbitrase disebut *arbitrability*³⁷.

Berdasarkan literatur ada beberapa masalah dalam rangka Prosedur arbitrase luar negeri yaitu:

1. Alasan-alasan para pihak memilih tempat arbitrase, "*choice of the place of arbitration*". Pertimbangan para pihak terhadap masalah tersebut adalah:
 - a. Dapat-tidaknya putusan arbitrase yang akan diucapkan dilaksanakan di negara kediaman para pihak dan,
 - b. Lingkungan hukum yang lebih menguntungkan³⁸.
2. Alasan-alasan memilih arbiter dalam arbitrase luar negeri³⁹. Jumlah dan latar belakang keahlian arbiter⁴⁰.
3. Memilih hukum, *choice of law* dalam arbitrase luar negeri,⁴¹ ada 3 macam *choice of law* yaitu: hukum untuk mengatur persidangannya (hukum Acara), hukum atau perangkat hukum yang diterapkan oleh para arbitor terhadap pokok sengketa, dan

³⁷Tineke, *op.cit* hal. 28

³⁸*ibid* hal 79-80

Tempat yang cenderung di pilih sebagai tempat arbitrase adalah negara dimana pengadilan hanya akan meninjau kembali putusan arbitrase berdasarkan 3 hal:

1. Dalam hal para arbiter telah me'ampai wewenangnya,
2. Kepada pihak yang dikalahkan tidak diberi kesempatan yang cukup untuk membela diri dan,
3. Pelanggaran terhadap ketertiban umum.

³⁹Jenis arbitrase luar negeri ada 2 yaitu,

1. *ad hoc arbitration*, arbitrase yang diselenggarakan secara temporer oleh para pihak sendiri tanpa ikut sertanya badan arbitrase.
2. *institutional Arbitration*, arbitrase terlembaga, arbitrase yang diselenggarakan oleh badan-badan arbitrase yang sudah tetap yang menyediakan ketentuan-ketentuan arbitrase (*arbitrase rules*) termasuk cara penunjukan arbiter.

⁴⁰*Ibid*, hal 87.

⁴¹*Ibid*, hal 89

hukum yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan persetujuan dan putusan arbitrase.⁴²

4. Formulasi klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase dalam arbitrase luar negeri. *Pactum de compromittendo*, Pasal 615 (3) Rv. Dan *Acta compromis*, Pasal 618 (3) Rv⁴³.
5. Alasan-alasan bahasa dalam arbitrase luar negeri⁴⁴.

Setelah para pihak mendapat penyelesaian sengketa⁴⁵ dari lembaga arbitrase⁴⁶ Internasional maka mereka akan mendapat putusan arbitrase internasional⁴⁷. Apa lagi yang diharapkan dari pihak yang dimenangkan dalam sengketa ini selain putusan arbitrase internasional tersebut dapat dilaksanakan agar Ia (pihak yang menang) dapat memperoleh ganti rugi atas kerugian yang telah dideritanya selama ini.

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia telah diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 69 UU No. 30 tahun 1999. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal di atas adalah:

1. Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

⁴²Huala Adolf, *op.cit.* hal 56-57.

⁴³Tineke, *op.cit.*, hal 90-91.

⁴⁴*Ibid.*, hal 94-95.

⁴⁵Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional maupun internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. (Ps. 34 (1) UU No. 30 tahun 1999)

⁴⁶Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul suatu sengketa. Indonesia, *Loc.cit.* Pasal 1 butir 8.

⁴⁷Putusan arbitrase internasional, adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. *Ibid.*, pasal 1 butir 9

2. Dijatuhkan oleh negara yang terikat perjanjian mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan Indonesia, putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan putusan Arbitrase internasional tidak dapat diajukan banding atau kasasi,
3. Hanya dalam ruang lingkup hukum perdagangan menurut hukum Indonesia,
4. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum,
5. Telah memperoleh *eksekuatur*⁴⁸ dari Pusat, putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional dapat diajukan kasasi,
6. Apabila menyangkut Negara Republik Indonesia harus mendapat *eksekuatur* dari Mahkamah Agung yang kemudian dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhadap putusan Mahkamah Agung tidak dapat diajukan upaya perlawanan,
7. Pelaksanaan putusan setelah diserahkan dan didaftarkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
8. Pelaksanaan eksekusi dilimpahkan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya,
9. Sita eksekusi dapat dilaksanakan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi,
10. Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juga mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 sampai Pasal 72, yaitu:

1. Pembatalan dapat diajukan apabila ada unsur-unsur:

⁴⁸ *Exequatur*, penetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa satu putusan arbitrase luar negeri dapat dilaksanakan dalam wilayah Republik Indonesia. Tineke, *op.cit.* hal 27.

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu,
 - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau,
 - c. putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat.
2. Permohonan pembatalan harus diajukan secara tertulis paling lama 30 hari sejak penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera Pengadilan Negeri.
 3. Permohonan pembatalan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri,
 4. Ketua Pengadilan Negeri-lah yang memutuskan menolak atau menerima pembatalan putusan arbitrase tersebut.
 5. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan 30 hari setelah permohonan diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri,
 6. Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung,
 7. Mahkamah Agung akan memutuskan 30 hari sejak permohonan banding diserahkan.

Berdasarkan tulisan diatas maka penulis hendak membahas putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Register: 012K/N/1999, tanggal 25 Mei 1999 Tentang Kewenangan Adili Kepailitan Pengadilan Niaga atau Arbitrase antara PT. Environmental Netwok Indonesia (PT. ENINDO) MELAWAN PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnac. Putusan ini penulis ambil karena putusan tersebut dijatuhkan tidak lama setelah dikeluarkannya Undang-undang tentang Kepailitan.

Kasus Posisi

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Register: 012K/N/1999, tanggal 25 Mei 1999 Tentang Kewenangan Adili Kepailitan Pengadilan Niaga atau Arbitrase

PT. ENINDO berdasarkan perjanjian manajemen "TURNKEY" telah menerima pekerjaan untuk jangka waktu 10 tahun dari PT. Putra Putri Fortuna Windu. Dalam perjanjian telah disepakati

bahwa PT. Enindo akan membayari dulu semua pekerjaan dan PT. Putra-Putri Fortuna akan mengganti pembayaran dengan menggunakan uang milik PFF International Corporation Corp (pihak penyanggah dana proyek). Dalam perjanjian tersebut juga terdapat *clause arbitrase*. Pada tahun ke-2 PT. Putra-putri Fortuna dan PFF International Corp. mengakhiri secara sepihak perjanjian TURNKEY. PT. ENINDO mempunyai piutang kepada PT. Putra-Putri Fortuna dan PFF Internasional Corp. yang belum juga dibayar. Ada kreditur lain yang juga punya tagihan yaitu Kelompok Tani Tambak FSSP Maserociannae. Berdasarkan adanya hutang dan adanya lebih dari 2 orang kreditur maka PT. ENINDO mengajukan kepailitan kepada Pengadilan Niaga.

Putusan Pengadilan Niaga:

Pengadilan Niaga menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut karena adanya *Clausule arbitrase*.

Putusan Kasasi:

Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini dan dalam putusannya menilai bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan *judex facti* harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

Putusan Mahkamah Agung adalah:

1. Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
2. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan PT. ENINDO
3. dan seterusnya.

Inti sari alasan yuridis Pendirian Mahkamah Agung adalah:

1. Karena adanya klausula Arbitrase dalam suatu perjanjian tidak dengan sendirinya menyebabkan Pengadilan Niaga dalam masalah kepailitan tidak berwenang mengadilinya.
2. Pasal 615 Rv, menentukan bahwa yang dapat diserahkan untuk menjadi kewenangan arbitrase adalah perselisihan mengenai hak-hak yang dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, artinya tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur hak-hak tersebut.
3. Berdasarkan Pasal 377 HIR dan Pasal 615-65d Rv, telah menempatkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian "*Azas Pacta Sunt Servanda*" ex Pasal 1338 BW.
4. Kewenangan absolut dari arbitrase sebagai *extra judicial* tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian pailit oleh PERPU No. 1/1998 Jo. UU. No. 4 Tahun 1998 sebagai Undang-undang khusus.

Analisa

Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa, "pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."

Pasal 280 (1) PERPU No. 1/1998 jo. UU No. 4/1998 menentukan bahwa semua permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya UU ini hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Menurut Penulis Undang-undang No. 4 tahun 1998 merupakan suatu ketentuan yang tidak dapat dikesampingkan oleh apapun karena ia punya kekuatan yang mengikat umum oleh karena itu setiap tindakan yang berhubungan dengan tindakan memohonkan pailit harus sesuai dengan UU tersebut. Penulis setuju dengan pertimbangan Mahkamah Agung, jangan sampai ketertiban Umum dilanggar dengan dalih adanya klausula arbitrase. Klausula arbitrase hanya dapat mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat umum.

Kesimpulan

Kewenangan mengadili perkara pailit tetap ada pada Pengadilan Niaga walaupun ada klausula arbitrase dalam suatu perjanjian, dasar pertimbangannya:

1. Seandainya PT. ENINDO tidak meminta pailit maka tentunya klausula arbitrase tetap dapat dijalankan bahkan mutlak.
2. Suatu pelaksanaan putusan arbitrase tidak boleh bertentangan dengan *public policy*.
3. Telah ada UU No. 4 tahun 1998 yang mengatur tentang pengajuan perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang.
4. Kewenangan mengadili perkara Kepailitan tetap berada di tangan pengadilan niaga.
5. Hendaknya hakim lebih hati-hati dalam memutus suatu perkara.

Daftar Pustaka

- Adolf, Huala Adolf, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1994
- E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, cet, ke-11, Jakarta: Ichtiar Baru, 1989
- Gautama, Sudargo, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, Jakarta: PT. Eresco, 1989
- , *Undang-undang Arbitrase 1999*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- , *Indonesian Business Law*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Ichsan, Akhmad, *Kompendium tentang Arbitrase Perdagangan Internasional (Luar Negeri)*, Jakarta:Pradnya Paramita 1993.
- J.L.Brierly, *Hukum Bangsa-Bangsa suatu pengantar hukum internasional*, Jakarta: PT. Bhratara, 1996,
- Juwana, Hikmahanto, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional Buku I – Bagian Umum*, cet.6. Bandung: Binacipta, 1989
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* diterjemahkan oleh Prof R Subekti, S.H. dan R. Tjirosudibio Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992.
- Lengdong, Tineke Louise Tuegeh, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1993)